**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERBUATAN “PAK OGAH
“MENURUTUNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Kevin Jeremy Putra Saragih

Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R SH.,MH

Pembimbing II : Ferawati SH.,MH

Alamat : Jl. Garuda mas komp villa garuda mas a-9 Labuh Baru, Pekanbaru

Email : kevinjeremy47@gmail.com Telepon : 082162474799

ABSTRACT

Traffic congestion in Pekanbaru City is caused by the rapid population growth spike. Many of the people of Pekanbaru City come from other areas who are looking for a livelihood in Pekanbaru City. Because of this problem, there were young people known as “Pak Ogah” who did not have a permanent job and considered it an opportunity that could be exploited and made money in return for traffic control services. Some people think that Pak Ogah's actions are reluctant to disturb road users. Pak Ogah's actions are clearly not justified by law. Pak Ogah can be subject to fines and imprisonment. However, the existence of Pak ogah is difficult to eliminate, not only because law enforcement is still weak, but also due to community participation to prevent illegal levies which are still minimal. The formulation of the problem summarized in this study is how the implementation of law enforcement, obstacles, and efforts in overcoming the practice of Pak Ogah's activities in Pekanbaru City. The purpose of this research is to find out the implementation of law enforcement against Pak Ogah, to know the obstacles in enforcing Pak Ogah's practices, and to find out the efforts made to overcome obstacles in law enforcement of Pak Ogah's practical activities.

The method used in this research is sociological research. The data collection technique used by the author is through interviews, questionnaires, and literature studies. The author analyzes the data using a qualitative method, namely by collecting data from observations and interviews with several respondents.

The results of the research conducted, namely, the implementation of law enforcement on the practices carried out by Mr. Ogah in the city of Pekanbaru is still not in accordance with the provisions stipulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the obstacles experienced in carrying out enforcement The law is a large number of Mr. Ogahs, having a thug background, and Mr. Ogah does not understand the law itself. Therefore, according to the author, it is very necessary to carry out socialization and guidance about the law from an early age.

Keywords: *Mr. Ogah, Traffic, socialization*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah dan bergantinya kepemimpinan, Kota Pekanbaru terus berkembang pesat dan menjelma menjadi kota yang luar biasa di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Bahkan, dikutip dari sebuah website Sindonews, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pekanbaru, kota masa depan yang berperan sebagai the Capital City of Sumatera atau Ibu Kota dari Pulau Sumatera. Perkembangan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Mc. Kinsey dan Boston Consulting Group dalam sebuah studi yang menyatakan bahwa Pekanbaru memiliki prospek sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia.¹

Kota merupakan Kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah atau bangunan gedung yang mendominasi tata ruang dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian town dan city dalam Bahasa Inggris. Selain itu, terdapat pula kapitonim “kota” yang merupakan satuan administrasi negara di bawah provinsi. Kota di bedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Desa atau kampung di dominasi oleh lahan terbuka misal, sawah, ladang, kebun dan bukan permukiman. Kota dalam pengertian umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi.²

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. Kemajuan teknologi di bidang transportasi warga kota yang ingin memiliki kendaraan sendiri seperti sepeda motor, pick-

up, mobil ataupun kendaraan lainnya di ikuti harga kendaraan yang bisa dijangkau dengan di cicil sehingga warga kota bisa memilikinya sehingga tidak heran jika angka kepemilikan kendaraan meningkat.

Jalur-jalur transportasi dan utilitas kota menjadi suatu pembentuk pola penggunaan lahan. Sejak awal pertumbuhan komunitas, berbagai kegiatan usaha memilih lokasi di sepanjang jalur lalu lintas primer dan di tempat-tempat yang merupakan konsentrasi para pelanggan potensial. Jaringan jalan dalam kota dapat didasarkan atas fungsi lahan, kualitas jalan maupun jumlah jalur, namun kajian yang lebih penting adalah sebaran wilayah yang dapat dilayani secara langsung oleh jaringan jalan, sehubungan dengan sarana transportasi dan aksesibilitas menuju lokasi-lokasi tertentu di dalam kota, karena transportasi adalah suatu faktor kunci yang menstimulasi akses ke jasa.³

Di sepanjang jalan Pekanbaru telah memiliki beragam rambu yang terpasang. Adanya rambu lalu lintas diharapkan dapat memberi ketertiban serta kenyamanan para pengguna jalan. Banyaknya pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas yang lemah.

Oleh karena permasalahan ini, hadirilah para pemuda atau dikenal dengan sebutan “Pak Ogah” yang tidak memiliki pekerjaan tetap menganggap sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang sebagai imbalan jasa penertiban lalu lintas. Sebagian masyarakat menganggap tindakan Pak Ogah mengganggu pengguna jalan, ada juga yang merasa sangat terbantu.

Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi Negara yang mengatur jalan di persimpangan. Tujuan dari Pak Ogah ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarbelakan motif ekonomi semata. Polisi cepek atau “Pak Ogah” (bahasa Belanda: voorijder, Polisi pembuka jalan) adalah orang-orang yang berusaha 'mengatur' lalu lintas dengan imbalan uang seikhlasnya dari pengguna jalan.

¹<https://daerah.sindonews.com/berita/1449205/174/pekanbaru-kota-percontohan-di-indonesia?showpage=all> diakses, tanggal 14 Desember 2020.

² Robert J. Kodoatie, *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*, C.V Andi Offset, Yogyakarta: 2013, hlm. 237.

³ Koestoer, *Dimensi Keruangan Kota*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 152.

Mereka yang umumnya dari kalangan masyarakat kelas bawah ini memiliki motif yang beragam - murni membantu kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan namun bisa juga malah melanggar aturan-aturan jalan raya demi uang.⁴ Polisi ini biasanya kita temui di perempatan, pertigaan, jalan satu arah yang sangat sempit, jembatan yang hanya dapat dilalui satu mobil atau jalan berlubang.

Dari hasil observasi yang sudah Peneliti lakukan pada tanggal 19 November 2020 bahwa Pak Ogah cukup meresahkan masyarakat dikarenakan Pak Ogah membuat kemacetan lalu lintas di persimpangan U-Turn. Selain itu Pak Ogah juga merusak fasilitas jalan seperti Water Barrier yang telah dibuat oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru agar pengendara roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tidak dapat memutar kendaraan di persimpangan jalan tersebut. Kemudian Peneliti bertanya kepada Pak Ogah tersebut, Pak Ogah tersebut mengatakan bahwa mereka hanya mencari uang untuk makan, dan Pak ogah tersebut mengatakan bahwa mereka sudah pernah ditangkap oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pembinaan dan pidana kurungan 1x24 jam.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) menjelaskan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.⁵

Keberadaan Pak Ogah sering kita jumpai di sejumlah U-Turn persimpangan jalan Kota Pekanbaru seperti di Jalan Tuanku Tambusai (persimpangan Jalan Paus),namun dikarenakan U-Turn persimpangan Jalan Paus sudah ditutup, kemudian Pak Ogah pindah ke U-Turn persimpangan jalan manggis, Jalan Soekarno Hatta (depan Hotel Grand Suka, Jalan HR Soebrantas (persimpangan Jalan Cipta Karya,Panam).

Aksi Pak Ogah jelas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Pak Ogah dapat dikenakan sanksi denda dan pidana penjara. Namun keberadaan pak ogah sulit dihilangkan, bukan hanya karena penegakan hukum masih lemah,

tetapi juga diakibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah pungutan liar yang masih minim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut Peneliti perlu diketahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap “Pak Ogah”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan “Pak Ogah” Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut Peneliti perlu diketahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap “Pak Ogah”. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang “**Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan “Pak Ogah” Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.”**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.
- b. untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

⁴<https://www.kompasiana.com/mjefriwahyudi/5ded4c83d541df3efb08af32/atasi-kemacetan-pak-ogah-legal-atau-tidak>. Diakses, tanggal 14 Desember 2020.

⁵ Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. untuk mengetahui upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk memberikan pemahaman pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktis hukum, dalam penegakkan hukum tentang penegakan hukum terhadap Pak Ogah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶

Menurut Prof. Sudarto, Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian

pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian⁷.

Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Jika berbicara mengenai penegakan hukum, maka kita tidak akan terlepas pula untuk berbiara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum, hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak. Hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.⁸

2. Teori Pidanaan

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuh pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hal ini akan dipaparkan dalam teori-teori pidanaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu makna dan hakikat pidana itu sendiri.

Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁹

Dalam masalah pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana, aliran klasik dan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertamanya meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat kebelakang, sementara aliran modern lebih melihat kedepan.

Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien)

Juris. 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, Pada tanggal 15 April 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate
⁹Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru: Jakarta, hlm. 5.

⁶ Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hlm. 58.

⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. ALUMNI, Bandung: 2010, hlm.113.

⁸ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", Can J.L. and

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama – tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi. Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰
2. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹¹
3. Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Namun, keberadaan Pak Ogah justru membuat masyarakat resah dikarenakan jika pengguna kendaraan tidak memberi uang maka Pak Ogah akan nekat menggedor kaca mobil dan memaksa pengguna

kendaraan untuk memberikan upah karena telah memberikan jalan.¹²

4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹³
5. Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat atau tindakan yang diperbuat.¹⁴
6. Praktik adalah suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.¹⁵
7. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek das sein atau Tatsachenwissenschaft dari hukum.¹⁷ Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi atau objek penelitian yang hendak melihat bagaimana penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian Peneliti adalah wilayah hukum di Kota Pekanbaru. Alasan penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru ialah dikarenakan maraknya keberadaan Pak Ogah yang meresahkan masyarakat.

¹⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 50.

¹¹ <https://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 februari 2021

¹² Azmi Gozali, Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam Menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta. 2003.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perbuatan.html> .. diakses pada tanggal 25 juli 2021.

¹⁵ <https://www.pengertiankomplit.blogspot.com> , diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

¹⁶ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung:1983, hlm. 84.

¹⁷ Niko Ngani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 82.

¹⁸ Suproto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineke Cipta, Jakarta: 2003, hlm.14.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Polisi Resor Kota Pekanbaru
2. Masyarakat Pengguna Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
3. Oknum yang berprofesi sebagai Pak Ogah

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁹

4. Sumber data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.²⁰ Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, internet, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada yakni:

1. Polisi Resor Kota Pekanbaru, Bapak Bripka Abdurrahman.
2. Oknum yang berprofesi sebagai Pak Ogah.

b) Kuisisioner

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Masyarakat pengguna Roda 2 dan Roda 4 Kota Pekanbaru sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai apa yang dilakukannya dan dirasakannya.

c) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu peneliti mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisa berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode Kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

¹⁹ Buhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta: 2011, hlm, 12.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.²¹

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 2009, Lalu lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 perubahan atas Undang-undang no 3 tahun 1965, yang menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.²²

1. Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Apabila kita melihat dari tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri, pada dasarnya kita dapat melihat dari konsideran menimbang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang antara lainnya menyebutkan:

a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Satu-satunya alat penegakan hukum yang efektif adalah ketidakmampuan. Untuk itu individu, biasanya melalui penahanan. Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukum dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Khususnya, dalam kasus pelanggaran kerah putih, penegakan hukum paling banyak efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak kriminal tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

²¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

²² Dikutip dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-royal/> diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

²³ John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, summer, 1998.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁵

1. Faktor Hukum
2. Penegakan Hukum
3. Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.²⁶

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²⁷

2. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam

proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalulintas

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.²⁸

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa: Jakarta, 2012. hlm. 86.

²⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32.

²⁶ Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan, hal. 34.

²⁷ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40

²⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan Pak Ogah Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan Sumber Daya Manusia. Kota Pekanbaru merupakan salah satu Ibukota Propinsi di Sumatra yang pertumbuhan ekonominya berkembang dengan baik, menjadi alasan utama munculnya kebutuhan yang sangat mendesak terhadap pembangunan sistem angkutan kota yang baik. Sasaran utama adalah untuk dapat menyediakan fasilitas angkutan yang melayani pergerakan orang dan penumpang dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan sosial.

Seiring perkembangan suatu kota pasti menimbulkan suatu masalah. Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Kondisi seperti kemacetan lalu lintas (traffic jams) dan lalu lintas merambat (traffic congestion), kesemrawutan lalu lintas campur aduk antara transportasi lokal dengan transportasi antar regional, kendaraan lambat dengan kendaraan cepat, kendaraan tidak bermesin dengan kendaraan bermesin dan pedagang kaki lima di trotoar dengan pejalan kaki, di mana terjadi perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki lima.

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana.

Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatannya atau kesalahannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian untuk dapatnya

seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.³⁰

Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau kelompok diluar institusi negara yang mengatur jalan di persimpangan - persimpangan dengan tujuan mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarkan motif ekonomi semata.³¹

Pak Ogah yang biasa disebut Polisi Cepek biasanya memanfaatkan kesemrawutan lalu lintas untuk mengambil peran polisi dalam mengatur lalu lintas di jalanan.³² Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah keberadaan pak ogah diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di Indonesia?

Pada dasarnya setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan, tikungan ataupun putaran jalan dengan maksud memperoleh imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang terorganisir untuk memperoleh imbalan berupa uang yang diberikan pengendara secara sukarela.

Oknum yang melakukan kegiatan praktik pengaturan lalu lintas ilegal ini kebanyakan dilakukan oleh pemuda setempat yang masih dibawah umur untuk mendapatkan uang saku, dan semua uang hasil yang mereka dapat tidak akan menjadi milik mereka semua namun akan kembali di setor kepada preman setempat disebut sebagai jatah atas lokasi yang di gunakan pemuda tersebut untuk melakukan pengaturan lalu lintas.³³

1. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan Pak Ogah Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Kemacetan yang menyebabkan simpang siurnya kendaraan bermotor dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan. yang pada akhirnya akan memungkinkan adanya bantuan pak Ogah yang mengambil alih peran polisi. Kenyataan yang ditemui dan dirasakan oleh masyarakat dalam mengatur lalu lintas pak Ogah tidak selalu bisa mengatur lalu lintas dengan baik dan menjamin

³⁰ Chairul Huda, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.20.

³¹ Azmi dalam Suhardyanto, 2005 hal.15.

³² Iwan, *Responsifitas Kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan*, JOM Universitas Makassar.

³³ Wawancara dengan Anto, Pak Ogah pada tanggal 15 Agustus 2021.

lalu lintas lancar tetapi Pak Ogah membantu para pengendara kendaraan bermotor untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan melanggar marka jalan.

Penegakan hukum terhadap kerusakan fasilitas jalan dan gangguan lalu lintas diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan”, kemudian Pasal 274 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.”³⁴

B. Hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

Maraknya kegiatan praktik perbuatan Pak Ogah di Pekanbaru sudah meresahkan sebagian besar masyarakat umum Pekanbaru, dikarenakan kegiatan yang mereka lakukan cukup membuat masyarakat kurang nyaman karena ketika tidak ada uang kecil yang ingin diberikan kadang ada beberapa dari pelaku melakukan hal yang tidak pantas seperti mencaci sampai hingga mendoakan pengendara mengalami kecelakaan.³⁵

Beliau menyampaikan ketika pulang kerja sedang terburu-buru karena ada keadaan yang mendesak, sampai di persimpangan jalan Soebrantas beliau diarahkan dua orang Pak Ogah untuk masuk ke persimpangan layaknya pengatur lalu lintas, kebetulan beliau tidak ada uang recehan sehingga meminta izin kepada Pak Ogah agar memberikan dia jalan untuk lewat. Namun Pak Ogah tersebut tidak memberikan jalan bahkan membentak beliau dan memaki dengan menendang pembatas

jalan (road barrier) untuk menakuti pengendara tersebut.³⁶

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam melakukan tugasnya untuk menindaklanjuti kegiatan praktik Pak Ogah di Kota Pekanbaru yaitu :

a. Jumlah Pak Ogah yang terlalu banyak

Kegiatan praktik pengatur lalu lintas ilegal biasanya dilakukan bukan hanya satu atau dua orang melainkan ada banyak orang yang membentuk kelompok, yang akan berpencar ke beberapa tempat di Pekanbaru yang luas.

Pekanbaru merupakan pusat kota yang sudah jelas memiliki aktifitas lalu lintas yang padat sehingga sangat di manfaatkan oleh Pak Ogah untuk mencari uang, luasnya Pekanbaru membuat banyaknya Pak Ogah yang melakukan praktik pengatur lalu lintas sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti praktik yang mereka lakukan. Ketika munculnya aparat kepolisian di lapangan, mereka akan melarikan diri melalui gang-gang yang ada di dekat persimpangan jalan.

b. Latar belakang dari Pak Ogah yang dikenal sebagai preman

Premanisme adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.³⁷ Sudah rahasia umum bahwa Pak Ogah merupakan orang yang memiliki latar belakang preman di sekitar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga melakukan praktik mengatur lalu lintas secara ilegal untuk mendapatkan imbalan uang dari pengendara.³⁸

Salah satu ciri - ciri preman adalah orang yang suka melawan dan tidak patuh

³⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

³⁵ Wawancara dengan saudari Anita, Pengendara sepeda motor pada tanggal 20 Agustus 2021.

³⁶ Wawancara dengan saudara Martin, pengguna jalan pada tanggal 21 Agustus 2021

³⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum dan Masyarakat*, hal. 22.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Suriadi, masyarakat setempat pada tanggal 21 Agustus 2021

terhadap aparat penegak hukum dan tidak pernah jera dikarenakan hukuman yang diberikan aparat penegak hukum hanya hukuman ringan sehingga kejadian tersebut terulang secara terus menerus. Hal ini membuat penegak hukum tidak begitu antusias dalam menindaklanjuti kasus dari Pak Ogah tersebut karena akan kembali terulang begitu di lapangan.

c. Pak Ogah tidak mengerti hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, Pak Ogah adalah bagian dari masyarakat umum yang tidak mengerti hukum karena menurut observasi dari penulis tidak pernah diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum itu sendiri sehingga berpendapat bahwa yang mereka lakukan tidaklah melanggar hukum.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap praktik perbuatan Pak Ogah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

1. Memperbanyak Polisi Lalulintas di Persimpangan Jalan

Banyaknya jumlah Pak Ogah membuat aparat penegak hukum sulit untuk menindaklanjuti kegiatan yang mereka lakukan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir adanya praktik perbuatan Pak Ogah di Pekanbaru,

yaitu memperbanyak polisi lalu lintas di Persimpangan jalan.

Dalam menjalankan fungsinya satuan polisi lalu lintas juga mempunyai tugas penting sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang kepolisian republik Indonesia. Tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas kepolisian adalah:³⁹

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Mengakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Namun yang terjadi di lapangan adalah kebanyakan polisi hanya berada di pos polisi yang tersedia untuk berjaga-jaga, yang seharusnya polisi harus turun ke jalan persimpangan untuk memberikan kenyamanan kepada pengendara yang melintas di jalan.

2. Sanksi Tegas Aparat Penegak Hukum dilapangan

Seperti yang kita ketahui latar belakang profil dari Pak Ogah merupakan preman yang ada di masyarakat yang biasanya melakukan pemalakan atau parkir liar se-enaknya. Untuk mengatasi hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan adalah menelusuri setiap gang-gang yang ada di persimpangan tempat Pak Ogah beraksi dan memberikan teguran dan himbauan agar tidak melakukan apa yang menjadi pelanggaran hukum.

Kepolisian juga harus serta merta turun kelapangan secara langsung menemui dari pihak preman tersebut untuk memberikan peringatan keras berdasarkan

³⁹ Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002.

laporan dari masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka.⁴⁰

3. Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Masyarakat

Suatu hal yang perlu dicermati, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi mereka yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang menyakitkan dan membebani kehidupan.

Pembinaan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan sistemik, dimana unsur-unsur sistem hukum nasional selain diperhatikan unsur materi hukum, dan unsur kelembagaan hukumnya, juga termasuk di dalamnya unsur budaya hukumnya. Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum tersebut.⁴¹

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik yang dilakukan oleh Pak Ogah di kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan Pasal 28 ayat (1) yaitu hanya pembinaan dan pidana kurungan dalam waktu 1x24 jam, sehingga dari hukuman yang di terapkan tidak memberikan hasil yang efektif terhadap tindakan Pak Ogah
2. Bahwa Hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam menindaklanjuti kegiatan praktik Pak Ogah yaitu Jumlah pak ogah yang terlalu banyak, latar belakang dari Pak Ogah yang dikenal sebagai preman, dan Pak Ogah tidak mengenal hukum sehingga tidak mengerti perbuatan yang di larang dalam undang-undang.
3. Penulis menilai upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum adalah dengan emperbanyak satuan kepolisian lalulintas, memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada pelaku sehingga tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi, dan melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap premanisme dan pelu Pak Ogah supaya perbuatan melawan hukum tidak dilakukan kembali.

B. Saran

1. Kepada Dalam Melakukan penegakan hukum, perlunya dilakukan persiapan yang matang untuk menindaklanjuti kegiatan praktik Pak Ogah dan memaksimalkan pos - pos kepolisian yang ada untuk selalu menjaga ketertiban lalu lintas agar mencegah Pak Ogah beraksi.
2. Perlu dilakukan kepada masyarakat sosialisasi rutin tentang pentingnya hukum dalam mengatur setiap tindakan yang dilakukan masyarakat khususnya terhadap Pak ogah.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut harus lah

⁴⁰ Wawancara Bapak sudirman, Masyarakat setempat pada tanggal 15 Agustus 2021.

⁴¹ *Ibid*

dilaksanakan dengan baik sehingga kedepannya hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashofa, Buhan, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

Baringbing, R. E., & John Handol, M. L, 2000, Catur wangsa yang bebas kolusi: simpul mewujudkan supremasi hukum. Pusat Kajian Reformasi.

Gosita , Arif, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Husen M Harun, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum DiIndonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Kodoatie Robert J, 2013, Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota, C.V Andi Offset, Yogyakarta

Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Koestoer, 2001, Dimensi Keruangan Kota, UI Press, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Nawawi,Barda. Arief,muladi, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung

Ngani, Niko, 2012, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sadyohutomo, Mulyono, 2008, Manajemen Kota dan Wilayah. Bumi Akasara, Jakarta

Sagala, Syaiful, 2009, Kemampuan Profesi, Alfabeta, Bandung

Saleh, Roeslan, 1979, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta

Sjafrizal, 2012, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, PT. Raja Grafindo Jakarta

Sudarto, 2010, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. ALUMNI, Bandung

Sudarto, 2010, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. ALUMNI, Bandung

Suproto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineke Cipta, Jakarta

Sri Madmudji, Soerjono Seokanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto,2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishin, Semarang

Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Dewantoro, Andreas, 2021 Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer, Buku Ori Jogja, Yogyakarta

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Azmi Fendri, 2011, “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1.

Aleardo Zanghellini, “A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Can J.L. and Juris. 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, Pada tanggal 15 April 2021 Januari

Azmi Gozali, 2003, Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam Menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus

John N. Gallo, "Effective Law- Enforcement Techniques for Reducing Crime". *Journal of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Makalah dari situs resmi www.Jimly.com

May Suhardyanto, Fenomena Pekerja Anak Sebagai (Pak Ogah) di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Skripsi Program studi Sosiologi (Fisipol) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 ayat 1 (satu).

D. Website

<https://daerah.sindonews.com/berita/1449205/174/pekanbaru-kota-percontohan-di-indonesia?showpage=all> diakses, tanggal 14 Desember 2020.

<https://www.kompasiana.com/mjefriwahyudi/5ded4c83d541df3efb08af32/atasi-kemacetan-pak-ogah-legal-atau-tidak>. Diakses, tanggal 14 Desember 2020.

<https://riaupos.jawapos.com/kriminal/30/11/2019/215531/tujuh%E2%80%98%E2%80%98pak-ogah%E2%80%99%E2%80%99-ditangkap.html>. Diakses, tanggal 14 Desember 2020.

<https://www.goriau.com/berita/baca/dimanamana-ada-pak-ogah-dishub-pekanbaru-harusnya-masyarakat-juga-patuh-dong.html> diakses, tanggal 14 Desember 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

<https://www.pelajaran.co.id/2018/18/pengertian-dan-jenis-jenis-wilayah-secara-umum-dan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 8 April 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 13 April 2021.

<https://www.pengertiankompli.blogspot.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perbuatan.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU/-V/2007, Diakses pada 21 maret 2019

<https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-sesuai-konstitusi> diakses 23 Maret 2019

<https://news.detik.com/berita/d-2806321/ini-alasan-mk-nyatakan-hukuman-mati-sesuai-konstitusi> diakses 25 Maret 2019